

***KONSTRUKSI SOSIAL SISTEM PERINGATAN DINI BANJIR BANDANG DI
DESA PAKIS KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER***

***SOCIAL CONTRUCTION OF EARLY WARNING SYSTEM TO FLASH
FLOOD IN PAKIS VILLAGE PANTI SUBDISTRICT JEMBER DISTRICT***

Penulis (Rindang El Nabila), Reviewer (Drs. Joko Mulyono, M.Si)

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: rindang_cay@yahoo.com

Abstrak

Konstruksi sosial sistem peringatan dini merupakan penggambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu yang menjadi salah satu aspek dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada sistem peringatan dini karena sangat penting dalam pengurangan resiko bencana banjir bandang. Teori yang digunakan yaitu konstruksi sosial Peter L. Berger dan Luckmann yang dihubungkan dengan UU. No.42 ayat (2) tentang hal yang dilakukan dalam peringatan dini yang ada di dalam UU. No. 24 tahun 2007. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa proses dialektis konstruksi sosial sistem peringatan dini yang meliputi tiga simultan, yaitu: a) objektivasi sistem peringatan dini yang meliputi 1) *site watching*; 2) *Focus Group Discussion* (FGD) yang dibagi dalam dua sesi dengan menggunakan metode kuesioner dan metode (*Logical Framework Analysis*) FLA; 3) penentuan *stakeholders* peringatan dini banjir dan pengenalan alat monitoring peringatan dini banjir bandang di Desa Pakis; 4) SOP peringatan dini dan 5) pembentukan *stakeholders* sistem peringatan dini. b) Internalisasi sistem peringatan dini yaitu sosialisasi yang digunakan adalah sosialisasi sekunder dimana masyarakat mulai masuk dan mempelajari hal yang baru. c) Eksternalisasi sistem peringatan dini yaitu anggota masyarakat menafsirkan sesuai dengan apa yang menjadi keputusannya pada waktu pelatihan dan setelah kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh JICA selesai.

kata kunci: konstruksi sosial, sistem peringatan dini, proses tiga simultan

Abstract

Social construction early warning system is depiction the social process through action and interaction individuals into one aspect in activity disaster management particularly in the early warning system because it is very important in risk reduction disaster flash floods. A theory that social used construction Peter L. Berger and Luckmann connected with law. No.42 subsection (2) about a thing done in forewarn that is in the act. No. 24 / 2007. Methods used that ' s using descriptive qualitative approach. The result of this research is in form of process of dialectical construction social early warning system which includes three simultaneous; namely: a) objektivasi early warning system which includes 1) site watching; 2) focus group dicussion (FGD) that divided into two sessions by using centrifugal a questionnaire and methods (framewark logical analysis) FLA; 3) the determination stakeholders forewarn flood and the introduction of monitoring instrument forewarn flash floods in the village Pakis; 4) forewarn and 5) the formation of stekeholders early warning system. b) The internalization of the early warning system namely socialization used is socialization secondary where people began in and learn more about it. c) early warning systems namely Externalization community members interpreted according to what became his decision at the time of training and after training activities conducted by JICA.

keywords :social construction, early warning systems, three simultaneous processes

PENDAHULUAN

Desa Pakis adalah salah satu wilayah zona rawan bencana banjir bandang di Kecamatan Panti yang mengalami bencana banjir bandang pada tahun 2006 dan 2011. Upaya pengurangan risiko bencana telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya yaitu bentuk Kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam bidang kebencanaan, yaitu *Japan Internatinal Cooperation Agency* (JICA). Di Kabupaten Jember *Japan International Cooperation Agency* (JICA) bekerjasama dengan NGO kebencanaan wilayah Jember yaitu Yayasan Pengabdian Masyarakat (YPM) dalam kegiatan pengurangan resiko bencana khususnya pada sistem peringatan dini yang diadakan di Desa Pakis dengan sosialisasi pengetahuan pengurangan resiko bencana melalui pelatihan dan pendidikan kebencanaan sistem peringatan dini.

Penelitian ini difokuskan pada konstruksi sosial sistem peringatan dini yang dilakukan di Desa Pakis meliputi tiga tahap yaitu: a) tahap objektivikasi; b) tahap internalisasi; dan c) eksternalisasi yang dihubungkan dengan Pasal 46 Ayat (2) UU No 24 Tahun 2007 tentang sistem peringatan dini yaitu; a) pengamatan gejala bencana; b) analisis hasil gejala bencana; c) pengambilan tindakan oleh pihak berwenang; d) penyebarluasan informasi mengenai peringatan dini; dan e) pengambilan tindakan oleh masyarakat. Tahapan konstruksi sosial berjalan secara berkesinambungan (*sustainable*).

Konstruksi sosial merupakan penggambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu yang menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan penanggulangan bencana sedangkan sistem peringatan dini merupakan elemen penting dalam pengurangan resiko bencana karena berisi tentang penyampaian informasi. Sehingga konstruksi sosial sistem peringatan dini merupakan salah satu elemen penting dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Pakis.

Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimanakah konstruksi sosial sistem peringatan dini banjir badang di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember?”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis konstruksi sosial sistem peringatan dini banjir bandang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori konstruksi sosial masuk ke dalam paradigma definisi sosial yang identik dengan teori fenomenologi. Sebab teori ini menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan masyarakat dapat terbentuk (Ritzer, 2007:59).

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann diawali oleh “Kenyataan sosial lebih diterima sebagai kenyataan ganda daripada hanya sebagai kenyataan tunggal. Kenyataan hidup sehari-hari memiliki dimensi objektif dan subyektif....Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat” (Berger dan Luckmann, 2013:xx). “Masyarakat sebagai realitas objektif yaitu tatanan sosial yang merupakan suatu produk manusia atau lebih tepat lagi ialah suatu produksi manusia yang berlangsung secara terus menerus”

(Berger dan Luckmann, 2013:71). “kenyataan sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif (intersubjektivitas). Lewat intersubjektivitas itu dapat dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus-menerus...menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individual...yang sedang saling beintegrasi dan berinteraksi” (Berger dan Luckmann, 2013:xv).

Masyarakat Sebagai Realitas subjektif ialah “pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna” (Berger dan Luckmann, 2013:177). Pemahaman ialah “pengetahuan...mengenai kehidupan sehari-hari terstruktur menurut relevansi. Beberapa diantaranya ditentukan oleh...situasi umum yang dialami masyarakat” (Berger dan Luckmann, 2013:60-61).

“Konstruksi sosial atas realitas sosial (*social construction of reality*) adalah penggambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif” (Berger dan Luckman, 2013:xi). “Realitas sosial diwarnai oleh proses konstruksi individu terhadap dunianya, melalui beberapa tahapan, yaitu obyektivikasi (pengobyektifan) dari proses-proses (dan makna-makna) subyektif yang dari situ lalu dipakai oleh individu membangun akal-sehat intersubjektifnya” (Berger dan Luckmann, 2013:48) yang dibangun ke dalam proses konstruksi sosial dalam proses dialektis, yaitu: “objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi” (Berger dan Luckmann, 2013:xx).

“*Objektivasi* di dalam realitas sosial ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi yang berada dalam kondisi obyektif di tengah kehidupan masyarakat ini. Masyarakat lalu menerima kesemua itu sebagai sesuatu yang telah dikonstruksi dan menjadi bagian realitas yang tetap” (Berger dan Luckmann, 2013:73).

Internalisasi, ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya (Berger dan Luckmann, 2013:178) *Internalisasi* ialah konstruks yang sudah diobyektifikasi kemudian diinternalisasi. Setelah proses internalisasi terjadi maka lepas dari proses pembentukan realitas obyektif. Bagi Berger dan Luckmann, berada dalam masyarakat berarti berpartisipasi dalam dialektika seperti itu (Berger dan Luckmann, 2013:xi). Proses untuk mencapai itu dilakukan dengan sosialisasi. Menurut Berger dan Lukmann (2013:xx) ada dua macam sosialisasi yaitu:

- a) Sosialisasi primer
Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat
- b) Sosialisasi Sekunder
Sosialisasi sekunder adalah lanjutan proses yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru ke dalam dunia objektif manusia.

Di dalam penelitian ini peneliti lebih cenderung ke sosialisasi sekunder. Sebab, sosialisasi yang terjadi di Desa Pakis yaitu sosialisasi yang sudah memasuki dunia objektif manusia yaitu dunia yang dibentuk oleh JICA mengenai *stakeholders* sistem peringatan dini banjir bandang.

Berger dan Luckmann (2013:188) mengatakan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan perannya (*role-specific-knowledge*), di mana peran-peran secara langsung atau tidak langsung berakar dari pembagian kerja. Menurut Berger dan Luckmann (2013:187) dikatakan “sebagai proses sosialisasi yang tidak pernah lengkap karena selalu ada tantangan untuk memelihara realitas itu, khususnya untuk memelihara realitas itu, khususnya untuk memelihara hubungan realitas subyektif dan realitas objektif”.

Eksternalisasi”ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia” (Berger dan Luckmann, 2013:295). ”Individu-individu menggerogoti tatanan sosial yang sudah mapan dan diganti dengan suatu orde baru. Maka individu di dalam proses eksternalisasinya mengidentifikasi dirinya dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan dalam institusi-institusi yang sudah ada. Peranan-peranan sudah dibangun polanya, dilengkapi dengan lembaga-lembaga yang mencerminkan pola-pola dari peranan-peranan” (Berger dan Luckmann, 2013:xxi).

a. Pengurangan Risiko Bencana Dalam Tahap Sistem Peringatan Dini

“Pada dasarnya masyarakat mempunyai kearifan lokal yang terbentuk berdasarkan pengalaman. Kearifan masyarakat perlu dikembangkan dengan memberi pengetahuan dan pelatihan secara praktis. Integrasi kearifan dan pengetahuan praktis dalam menghadapi bencana merupakan usaha peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Sosialisasi merupakan cara penyampaian pengetahuan secara massal agar masyarakat dapat berbuat atau melakukan sesuatu dalam menghadapi bencana dengan mengurangi risiko bencana” (Subiyakto *et al.*, dalam Indiyanto, 2012:23-24).

Selanjutnya menurut Affeltranger *et al.*, (2007:29) mendefinisikan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) yaitu “kerangka kerja konseptual yang terdiri dari elemen-elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat dan untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak yang ditimbulkan bahaya dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan”.

Menurut Undang-Undang No.24 tahun 2007 (dalam Maarif, 2007), bahwa Sistem peringatan dini (*Early warning system*) dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang No. 24 tahun 2007 diartikan sebagai serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Kemudian secara lebih lanjut dijelaskan pula dalam Pasal 46 Ayat (2), hal-hal yang dilakukan dalam tahap peringatan dini yang berbunyi:
“Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. pengamatan gejala alam;
2. analisis hasil gejala alam;
3. pengambilan keputusan oleh pihak berwenang;
4. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
5. pengambilan tindakan oleh masyarakat

b. Definisi Bencana

Menurut Affeltreanger (2007:29) bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

c. Konsep Banjir Bandang

Banjir bandang (*flash flood*) biasanya terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungainya curam. Limpasannya dapat membawa batu besar/bongkahan dan pepohonan serta merusak/menghanyutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut dengan singkat (Harjadi *et al.*, 2002:18-19).

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mencari fenomena dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi? dan bagaimana terjadinya?

Untuk menganalisis fenomena sistem peringatandini banjir bandang di Desa tersebut, peneliti menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Luckmaan yang dihububungkan dengan UU. No. 42 ayat (2) tentang hal yng dilakukan dalam peringatan dini yang ada di dalam UU. No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Penelitian dilakukan di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Desa Pakis adalah salah desa di Kecamatan Panti yang mengalami banjir bandang pada tahun 2006 dan 2011, desa ini juga merupakan tempat pelatihan peringatan dini sebelum kejadian banjir bandang yang diadakan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang bekerjasama dengan *Yayasan Pegabdian Masyarakat* (YPM).

Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, informan secara acak dipilih sesuai kriteria, baik informan pokok maupun tambahan. Pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam proses keabsahan data, peneliti menggunakan *cross check* data teknik dengan mengecek data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam analisis data, peneliti melakukan pengkategorian data, menginterpretasi data, memaparkan hasil

penelitian, dianalisis baru kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam kenyataan sosial, masyarakat merupakan kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif individu berada di luar diri manusia yang berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Berger dan Luckmann (2013:xx) bahwa “Kenyataan sosial lebih diterima sebagai kenyataan ganda daripada hanya sebagai kenyataan tunggal. Kenyataan hidup sehari-hari memiliki dimensi objektif dan subjektif...Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat”.

Bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Pakis membentuk masyarakat menjadi sebuah kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. Kenyataan objektif yang terbentuk di Desa Pakis yaitu pengalaman-pengalaman individu-individu masyarakat ketika bencana banjir bandang pada tahun 2006 dan 2011. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif yang terbentuk di Desa Pakis yaitu individu-individu di dalam masyarakat mengalami hal tersebut dan merupakan bagian dari sejarah yang tak bisa dipisahkan oleh apapun yang mereka tafsirkan dan pahami tentang penyebab dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Realitas objektif dan realitas subjektif masyarakat dalam bencana banjir bandang di Desa Pakis akan dideskripsikan sebagai berikut.

a. Realitas objektif

“Masyarakat sebagai realitas objektif yaitu tatanan sosial yang merupakan suatu produk manusia atau lebih tepat lagi ialah suatu produksi manusia yang berlangsung secara terus menerus” (Berger dan Luckmann, 2013:71). Realitas objektif yang terjadi di Desa Pakis yaitu terjadi pada tahun 2006 yang diakibatkan hujan deras yang terjadi selama tiga hari tiga malam dan menerjang lima desa sekaligus di wilayah Kecamatan Panti yaitu Desa Pakis, Desa Kemiri, Desa Suci, Desa Panti, dan sebagian Desa Glagahwero. Kemudian pada kejadian banjir bandang pada tahun 2011, pengalaman masyarakat di Desa Pakis akan kejadian banjir bandang yang terjadi pada tahun 2006 terulang kembali. Di dalam realitas objektif yang terjadi pada masyarakat di Desa Pakis, masyarakat mengetahui tentang bencana dari pengalaman-pengalaman mereka dalam menghadapi bencana pada tahun 2006 dan 2011, namun pengalaman ini belum tersusun secara ilmiah.

Pengetahuan masyarakat tentang bencana seperti: tanda-tanda akan terjadinya banjir bandang yaitu di Dusun Ketajek yaitu daerah yang dekat dengan Lereng Pegunungan Argopuro dapat melihat kondisi debit air sungai yang semakin besar yang berbeda dari biasanya sedangkan di Dusun Cempaka dapat melihat aliran air sungai yang mulai mengecil dan bau tanah yang berbeda dari biasanya.

Dalam penyampaian informasi tentang adanya banjir bandang ini yaitu di Dusun Ketajek yang minim akan listrik

cara penyampaian informasinya yaitu melalui suara (berteriak-teriak) dan menggunakan kentongan dari besi (orang sana menyebutnya *lonceng*), di Dusun Pakis Utara cara penyampaian informasi yaitu dengan menyiarkan di masjid akan kondisi yang terjadi karena di dusun ini terdengar suara dentuman yang keras akibat ditimbulkan oleh banjir bandang yang terjadi, sedangkan di Dusun Ketajek cara penyampaian informasi melalui senter yang diputar-putar, suara (berteriak-teriak), mengedor rumah warga, dan HP. Namun pada kejadian banjir bandang yang terjadi masih belum ada penyampaian informasi mengenai kondisi yang terjadi baik dari Dusun Ketajek, Dusun Pakis Utara, Dusun Cempaka, maupun Pemerintah Desa Pakis.

b. realitas subjektif

Masyarakat sebagai realitas subjektif ialah “pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna” (Berger dan Luckmann, 2013:177). Realitas subjektif yang terjadi di Desa Pakis yaitu pemahaman atau penafsiran masyarakat tentang bencana banjir bandang yang terjadi yang terjadi pada tahun 2006 dan 2011.

Di dalam realitas subjektif yang terjadi di Desa Pakis yaitu kesalahan persepsi masyarakat tentang penyebab banjir bandang diantaranya yaitu disebabkan oleh pembalakan liar. Hal tersebut diungkapkan oleh pak Satuman, Selaku ketua Rt di Dusun Ketajek:

“Oh kalo dulu itu jamannya gusdur memang terjadi pembalakan memang disinilah akhirnya 2006 ada longsor sebenarnya sebelum pembalakan liar sebelum ada gusdur kata pak gusdur gimana punya nenek moyang kan he he he”.

Kesalahan persepsi tersebut menyebabkan pembalakan liar secara besar-besaran. Selain pembalakan liar, menurut masyarakat kerusakan hutan juga terjadi karena banyaknya pohon tumbang yang diakibatkan angin gunung.

Pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah dalam mengantisipasi bencana sebelum adanya pelatihan dari JICA, langkah-langkah yang diadakan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana kurang maksimal atau bisa dikatakan belum pernah dilakukan langkah-langkah yang dilakukan hanya pada tanggap darurat dan pasca bencana.

Proses Dialektis Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial dalam peringatan dini sangat penting karena “Masyarakat merupakan elemen resiko yang menduduki peringkat utama terkena dampak bencana” (Subiyakto *et al.*, dalam Indiyanto, 2012:18). Sehingga pembentukan realitas sebagai upaya meminimalisir resiko bencana yaitu dengan sistem peringatan dini yang baik sangat diperlukan masyarakat. Hal ini dapat terlihat ketika bencana banjir bandang terjadi masyarakat di Desa Pakis rentan terhadap bahaya

banjir. Sebab, masyarakat pedesaan khususnya di Desa Pakis “ketersediaan pelayanan dasar, peringatan bahaya, dan mekanisme reaksi terhadap bahaya sangatlah terbatas” (Subiyakto *et al.*, dalam Indiyanto, 2012:18). Hal ini di karenakan keterbatasan pengetahuan mereka akan bencana masihlah kurang.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kebencanaan yaitu dalam kegiatan sistem peringatan dini, khususnya di Desa Pakis “dilakukan dengan sosialisasi pengetahuan kebencanaan melalui pelatihan dan pendidikan kepada berbagai unsur dan lapisan masyarakat” (Subiyakto *et al.*, dalam Indiyanto, 2012:22-23) yang dilakukan oleh JICA yang bekerjasama dengan YPM.

“Pada dasarnya masyarakat mempunyai kearifan lokal yang terbentuk berdasarkan pengalaman. Kearifan masyarakat perlu dikembangkan dengan memberi pengetahuan dan pelatihan secara praktis. Integrasi kearifan dan pengetahuan praktis dalam menghadapi bencana merupakan usaha peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Sosialisasi merupakan cara penyampaian pengetahuan secara massal agar masyarakat dapat berbuat atau melakukan sesuatu dalam menghadapi bencana dengan mengurangi risiko bencana” (Subiyakto *et al.*, dalam Indiyanto, 2012:23-24).

Dalam siklus penanggulangan bencana pada manajemen bencana terdapat empat tahap. Dalam siklus ini bergerak sesuai dengan tahapan dan tidak berhenti pada tahap tertentu misalnya setelah terjadi bencana bukan berarti siklus ini selesai tetapi terus berjalan dan berkesinambungan dengan harapan dapat berkelanjutan (*sustainable*).

Untuk mengurangi risiko bencana “desa/kelurahan merupakan wewenang pemerintah di tingkat bawah, dan masyarakatnya sebagai penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku langsung yang akan merespon bencana di sekitarnya. Banyak pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan banyak pula pihak lain yang bekerja bersama masyarakat. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua yang dimiliki, masyarakat desa/kelurahan perlu menciptakan sikap dan perilaku tangguh bencana, sehingga resiko korban jiwa, kerugian harta, dan lain-lain akan dapat diperkecil dan bahkan dihindari [<http://bnpb.go.id/website/asp/pub.asp?p=2>].

Dalam sistem peringatan dini di Desa Pakis tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui proses interaksi yang dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat secara terus-menerus. Berger dalam dan Luckmann (2013:xxi) menyatakan bahwa “Konstruksi sosial atas realitas sosial (*social construction of reality*) adalah penggambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif”.

Proses konstruksi sosial dalam sistem peringatan dini yang terjadi di Desa Pakis berlangsung dalam proses dialektis, yaitu: “objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi” (Berger dan Lukmaan, 2013:xx). Proses dialektis tahap konstruksi sosial akan dideskripsikan dalam uraian sebagai berikut.

a. Objektivasi dalam sistem peringatan dini

Objektivasi dalam sistem peringatan dini yaitu penyampaian materi-materi dan menstrukturkan pemikiran

masyarakat terhadap sistem peringatan dini banjir bandang, sehingga kegiatan tersebut mengkonstruksi ke dalam pemikiran masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut dan pada akhirnya akan menjadi sebuah realitas yang tetap pada saat itu.

Di dalam pengamatan gejala alam pada tahap objektivasi yaitu kegiatan *site watching*. *Site watching* yaitu melihat kondisi yang sebenarnya yang berada di Desa Pakis. Kegiatan pengamatan ini sebagai langkah mengetahui secara pasti kondisi lapang yang sebenarnya karena hal tersebut sangat penting dilakukan dan tidak berdasarkan angan-angan di dalam pikiran masing-masing individu, namun dilakukan secara nyata dengan melihat kondisi yang terjadi.

Di dalam analisis hasil gejala bencana yang dilakukan oleh JICA yaitu dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Metode FGD ini menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner “digunakan untuk melengkapi informasi awal tentang karakteristik masyarakat, terkait dengan pemahaman persepsi mengenai banjir bandang dan bentuk kegiatan peringatan dini” (Hani, 2011b: 11)

Kemudian Kegiatan FGD ini dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu dengan menggunakan metode LFA (*Logical Framework Analysis*). “Metode LFA (*Logical Framework Analysis*) yaitu melakukan diskusi secara terfokus dengan tujuan untuk menemukan akar masalah dari banyak masalah yang dihadapi masyarakat terkait dengan pelaksanaan peringatan dini” (Hani, 2011b: 14).

Dalam pengambilan keputusan oleh pihak berwenang yang dilakukan oleh JICA yaitu menentukan *Stakeholders*, “untuk menentukan *stakeholder* yang akan dilibatkan dalam kegiatan SOP (*Standard Operating System*), dilakukan dengan:

1. Diskusi awal dengan Sekretaris Satlak dan Kepala Desa di Kabupaten Jember untuk menentukan calon peserta. Calon peserta antara lain dari aparat dan masyarakat. Aparat terdiri dari yang berwenang di tingkat kabupaten dan aparat tingkat pemerintah lokal baik hulu (sumber) maupun hilir (terdampak). Sedangkan masyarakat pun dipilih sampel masyarakat desa dari hulu maupun hilir.
2. Mengusulkan nama-nama calon peserta (hulu dan hilir) tersebut kepada pejabat berwenang (Asisten II Kabupaten Jember).
3. Persetujuan pejabat berwenang dengan memberikan surat edaran untuk mengikuti kegiatan” (Hani 2011a: 38).

Setelah pembentukan *stakeholders* kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan alat monitoring Peringatan Dini di DAS Kali Pakis. Peralatan Monitoring peringatan dini ini sangat menunjang para *stakeholders* (pemegang kunci) ketika mereka memberitahukan masyarakat di sekitarnya sebelum kejadian bencana banjir bandang datang. Peralatan monitoring peringatan dini yang di pasang di Desa Pakis ialah sebagai berikut.

1. Alat Pengukur Curah Hujan.
2. Alat Pengukur Curah Hujan Otomatis (Sistem Cuaca Dengan Menggunakan Baterai).
3. Sensor Curah Hujan.
4. Sensor Ketinggian air.

Di dalam penyebarluasan informasi tentang peringatan dini dalam tahap objektivikasi yaitu ada pada kegiatan SOP sebelum kejadian banjir bandang di DAS kali Pakis yang dibentuk oleh JICA dengan *stakeholders* yang dibentuk sebelumnya. *Standard Operation Procedure* (SOP) Peringatan Dini Sebelum Kejadian Banjir Bandang di DAS Kali Pakis ialah hasil akhir dari rangkaian kegiatan yang dibuat oleh JICA. SOP peringatan dini ini ialah hasil akhir yang dibuat dari rangkaian kegiatan yaitu mulai dari FGD, *Site Watching*, TTE dan dihasilkanlah SOP ini.

Dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat pada tahap objektivikasi ini yaitu masyarakat di Desa Pakis sudah mulai dibentuk sebagai *stakeholders* peringatan dini banjir bandang. JICA sebagai motivator penggerak dalam kegiatan peringatan dini ini menanamkan sistem pembelajaran secara langsung melalui semua kegiatan yang dilakukan selama dua hari di Desa Pakis dan hal ini ditanamkan kepada masing-masing individu dalam melakukan kegiatan pemberian informasi tentang peringatan dini bencana yang dapat diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan dan dapat diterima sewajarnya oleh masyarakat.

b. Internalisasi sistem peringatan dini

Internalisasi dalam sistem peringatan dini yaitu individu-individu masyarakat mengidentifikasi dirinya di tengah lembaga yang telah dibentuk sebelumnya yaitu berupa *stakeholders* peringatan dini, dimana individu-individu masyarakat menjadi anggotanya.

Ada dua macam bentuk sosialisasi, namun dalam proses internalisasi di Desa Pakis yaitu lebih cenderung pada sosialisasi sekunder. Sebab, sosialisasi sekunder yaitu dimana individu-individu sudah masuk ke dalam sektor-sektor baru yaitu contohnya di Desa Pakis masyarakat ke dalam dunia baru mereka, yaitu dalam pelatihan peringatan dini banjir bandang yang telah dipelajari dalam kegiatan yang dilakukan oleh JICA. Individu-individu ini mulai masuk dan mempelajari hal yang baru diluar pengetahuan mereka yang lama, seperti contohnya pengetahuan mereka tentang bencana dan langkah-langkah yang dilakukan mengenai bencana itu apa. Individu-individu masyarakat di Desa Pakis masuk ke dalam dunia objektif manusia, yaitu dunia bentuk dari JICA berupa pelatihan tentang peringatan dini banjir bandang.

Hasil dari kegiatan *Site Watching* berupa pengamatan gejala bencana di Dusun Ketajek dan Dusun Cempaka, menghasilkan peta rawan bencana yang memetakan Dusun Ketajek sehingga kegiatan tersebut menghasilkan rute dan lokasi pengungsian sebagai langkah awal penyelamatan diri sebelum bantuan datang.

Lokasi pengungsian di Dusun Ketajek dalam kegiatan *site watching* berdasarkan hasil diskusi antara masyarakat dengan pihak JICA. Lokasi yang dipilih oleh masyarakat di

Dusun Ketajek ialah DK-4 yaitu lereng gunung yang dirasa aman. Sebab, lereng tersebut landai jika dibandingkan dengan lereng yang lainnya. Kemudian, dalam menentukan arah evakuasi di Dusun Cempaka, yaitu berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh warga dan tim dari JICA, arah evakuasi di Dusun Cempaka yaitu berada sebelah barat yaitu tempat yang dirasa lebih tinggi daripada rumah-rumah penduduk.

Di dalam analisis hasil gejala bencana pada tahap internalisasi yaitu penyampaian materi dalam kegiatan FGD yang disampaikan oleh JICA dalam penerimaan masyarakat berbeda-beda, namun masyarakat paham bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendidikan kebencanaan yang sangat penting bagi mereka sendiri di masa yang akan datang.

Dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang yaitu ketika diadakannya pelatihan yang dilakukan oleh JICA salah satu contohnya yaitu ketika kegiatan pelatihan peringatan dini berlangsung, ada sebagian masyarakat yang ditunjuk hanya mengikuti pelatihan peringatan dini tersebut hanya sehari saja. Contohnya yaitu Pak Supandi karena keesokan harinya beliau merantau ke luar daerah untuk bekerja. Dengan kondisi tersebut, kemudian diganti dengan pak Trianto yaitu sinder Afdeling Kahendran untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh JICA. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Satuman, selaku Ketua RT di Dusun Ketajek:

“disini yang dapat tiga orang, cuman pak Supandi ndak bisa, anu soalnya kerja ke Bali soalnya dapat satu hari ikut keesokan harinya ke Bali kerja disana, kalo Senawi keamanan disini ikut, trus saya. Akhirnya pak Supandi itu diganti pak Trianto Sinder Afdeling Kahendran”

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam penentuan *stakeholders*, nama pak Supandi tetap diikutsertakan, walaupun beliau sendiri tidak mengikuti kegiatan tersebut dan tinggal di luar daerah (Bali). Hal ini menunjukkan bahwa dalam penentuan *stakeholders* tidak melihat kondisi yang sebenarnya pada masyarakat yang ikut serta pada kegiatan tersebut.

Selain mendapat topi dan kaos setelah kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh JICA selesai masyarakat yang hadir juga mendapat uang pelatihan sebesar 35 ribu rupiah. Hal ini dilakukan oleh JICA sebagai “*pamrih*” masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan peringatan dini yang diadakan oleh JICA. Jika ada kendala di kemudian hari, hal ini dapat menghambat kinerja para *stakeholders* yang telah dibentuk oleh JICA ataupun para undangan yang telah hadir pada waktu kegiatan pelatihan peringatan dini yang diadakan oleh JICA. Hal tersebut diungkapkan oleh pak Supianto, selaku wakil Kepala Dusun Pakis Utara:

“dapat 35, semua dapat”

Dalam penyebarluasan informasi tentang peringatan dini yaitu pada kegiatan *Table Top Of Exercises* (TTE) Dalam kegiatan ini, yaitu di praktekkan

cara menghubungi orang-orang yang dipilih sebagai *stakeholders* dalam kondisi cuaca tertentu dimana salah satu menghubungi dan memberitahu kondisi debit air sungai dan curah hujan ke yang pihak lainnya secara berurutan sampai pada posisi terakhir yaitu pak Sekdes dan pak Pak Kades dan langsung menghubungi koramil ataupun kepolisian. Praktek ini dilakukan agar masyarakat mengerti dan mengetahui kondisi dari wilayah hulu atau Dusun Ketajek dan wilayah hilir atau Dusun Cempaka.

Peserta yang hadir dalam TTE tersebut yaitu (Hani, 2011c:7):

1. Masyarakat Desa Pakis yang terdiri dari masyarakat di:
 - Bagian Hulu: Wilayah Perkebunan Kahendran
 - Bagian Tengah: Daerah Portal dan Dusun Pakis Utara
 - Bagian Hilir: Dusun Cempaka dan Dusun Kemundungan
1. Kecamatan Panti
2. Dinas Pengairan Kabupaten Jember
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4. Komando Rayon Militer (Koramil)
5. Polisi Sektok (Polsek)

Di dalam penyebarluasan informasi tentang peringatan dini yaitu dalam tahap internalisasi ini berupa cara alat-alat monitoring peringatan dini itu dapat difungsikan. Alat monitoring peringatan dini tersebut diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Alat Pengukur Curah Hujan Otomatis (Sistem Cuaca dengan Menggunakan Baterai)

Alat pengukur curah hujan otomatis dengan menggunakan baterai ini “terletak di Afdeling Kahendran Ketajek. Pihak yang bertanggungjawab dalam peralatan ini ialah Pihak PDP Afdeling Kahendran dan Ketua RT yaitu pak Satuman. Alat tersebut terletak didepan Kantor Afdeling Kahendran yang berdekatan dengan alat pengukur curah hujan milik perkebunan.

Alat ini terdiri dari kincir kecil dan penentu arah angin yaitu yang berguna untuk mengetahui tekanan angin dan cuaca. Kemudian kincir angin dan penentu arah tersebut dihubungkan ke tabung kecil yang berfungsi untuk mengetahui intensitas curah hujan. Hasil akhir dari alat tersebut dapat dilihat di *wireless wheater station* dengan menggunakan baterai.

2. Sensor Curah Hujan

Sensor curah hujan terletak didepan mushalla pak Sutrisno selaku Wakil Kepala Dusun Cemapaka atau kordinator wilayah hilir. Alat berupa tabung yang “di setting per 30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm, dan 150 mm” (Hani, 2011b:11) yang disambungkan ke kotak sensor peringatan di mushalla. Kotak sensor peringatan tersebut terdapat lima level, dan “terdapat lampu dan sirine yang akan berbunyi bila curah hujan mencapai 30 mm, lalu akan menyala dan berbunyi pada level selanjutnya” (Hani, 2011b:11). Kontak sensor peringatan tersebut berfungsi sebagai berikut: “Peringatan pertama/level 1 menandakan “Status perhatian” yang menandakan bahwa level curah hujan sudah mencapai 30 mm/jam. Peringatan kedua/level 2

menandakan “kondisi Awas” yang menandakan bahwa level curah hujan mencapai 60 mm/jam. Peringatan ketiga/level 3 menandakan “Kondisi Evakuasi” yang menandakan bahwa level curah hujan mencapai 90 mm/jam. Peringatan keempat/level 4 menandakan “Kondisi Kritis” yang menandakan level curah hujan mencapai 120 mm/jam. Peringatan kelima/level 5 menandakan “Kondisi Bahaya” yang menandakan “Kondisi Bahaya” yang ditandai dengan level curah hujan mencapai 150mm/jam” (Hani, 2011c:39-69).

3. Sensor Ketinggian air

Alat sensor ketinggian, terdapat di “DAM Dusun Cempaka dan yang bertanggungjawab dalam alat tersebut ialah pak Pak Sutrisno” (Hani, 2011d:23). Namun di dalam pelaksanaannya alat sensor ketinggian air tersebut, dalam penanggungjawab dan pengelolaannya dipegang oleh pak Fitriyah. Sebab, rumah pak Fitriyah berada di pinggir sungai Kali Pakis dan lokasi tersebut merupakan sasaran banjir yang terjadi selama dua kali berturut-turut.

Dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh JICA, alat ketinggian air tersebut datang setelah kegiatan yang dilakukan oleh JICA berakhir. Alat ketinggian air tersebut diletakkan di DAM Cempaka. Sebelum alat itu diletakkan di DAM Cempaka, alat tersebut diuji coba terlebih dahulu yaitu dengan cara menyediakan ember yang nantinya alat ketinggian air tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Alat sensor ketinggian air ini hampir sama cara kerjanya dengan sensor curah hujan, dan alat kerja keduanya saling berkesinambungan dimana ketika curah hujan tinggi maka ketinggian air sungaipun juga bisa dilihat.

Cara kerja alat ketinggian air tersebut yaitu alat ketinggian air ini dihubungkan langsung ke kotak peringatan. Kotak peringatan ini terdapat level satu sampai lima yang ditandai “dengan lampu menyala dan keluar suara” (Hani, 2011b: 10). Kotak sensor peringatan berfungsi sebagai berikut: “Peringatan pertama/level 1 menandakan “Status perhatian” yang menandakan bahwa level ketinggian air sungai sudah mencapai 100 cm. Peringatan kedua/level 2 menandakan “kondisi Awas” yang menandakan bahwa level ketinggian air mencapai 120 cm. Peringatan ketiga/level 3 menandakan “Kondisi Evakuasi” yang menandakan bahwa level ketinggian air mencapai 140 cm. Peringatan keempat/level 4 menandakan “Kondisi Kritis” yang menandakan level ketinggian air mencapai 160 cm. Peringatan kelima/level 5 menandakan “Kondisi Bahaya” yang menandakan “Kondisi Bahaya” yang ditandai dengan level ketinggian air mencapai 180 cm” (Hani, 2011c: 39-69).

4. Alat Pengukur Curah Hujan

Alat pengukur curah hujan ini berada di Kantor Desa Pakis yang bertanggungjawab dalam memegang alat ini ialah Pak Zaini selaku Kepala Desa Pakis. Alat ini berfungsi untuk mengamati iklim, mengukur

kecepatan angin, dan curah hujan yang dihubungkan ke komputer.

Dalam peletakan alat sensor curah hujan tersebut, Pak Zaini selaku Kepala Desa Pakis membuat pagar pembatas dengan memakai uang pribadi beliau sebanyak Rp 3.500.000,- agar tidak terjadi pengrusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Setelah tiga bulan dari pemasangan pagar tersebut, uang pribadi yang dipakai pak Zaini untuk membuat pagar diganti oleh JICA.

Dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh JICA ada beberapa warga yang mengerti dan memahami kegiatan tersebut, namun ada beberapa yang kurang memahami. Sebab, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat yang hadir menggunakan teknik “3D (*datang, duduk, diam*)”, dan hanya mendengarkan setengah-setengah tidak sepenuhnya mengikuti. Hal inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh JICA dan yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu para *stakeholders* yang diberi wewenang lupa anggotanya sendiri.

c. Eksternalisasi sistem peringatan dini

Eksternalisasi sistem peringatan dini ialah penyesuaian diri individu-individu di dalam masyarakat tentang pelatihan dan simulasi mengenai pengurangan risiko bencana khususnya dalam tahap peringatan dini. Individu-individu telah masuk dalam tatanan sosial yang telah dibentuk oleh lembaga dan kemudian digantikan dengan tatanan sosial yang baru oleh lembaga tersebut dengan yang baru. Maka individu dalam proses eksternalisasi ini kemudian mengidentifikasi dirinya dalam peranan sosial yang sudah dibentuk oleh lembaga berupa pola-pola yang mencerminkan peranan-peranan masing-masing individu dalam institusi lembaga yang dilembagakan.

Dalam pengamatan Gejala Bencana dalam proses eksternalisasi yaitu dalam penentuan lokasi pengungsian yang dirasa aman bagi masyarakat di Desa Pakis ketika bencana banjir bandang akan segera datang. Hal ini berdasarkan pengalaman masyarakat dan rekomendasi oleh JICA yang tetap mereka gunakan hingga saat ini.

Selain itu menurut Surono, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, menyatakan bahwa beberapa waktu lalu terjadi gerakan tanah yang berupa retakan tanah di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Retakan tanah sudah terjadi sudah mulai terjadi pada tahun 2010 dan berkembang sampai saat ini dijumpai sebanyak 73 titik retakan tanah. Kondisi daerah gerakan tanah secara umum daerah retakan tanah dan sekitarnya merupakan daerah perbukitan dan pemukiman dengan kemiringan lereng terjal-sangat terjal. Daerah gerakan tanah diperkirakan berupa batuan breksi vulkanik di bagian atas dan batuan tufa atau lava di bagian bawah. Potensi gerakan tanah di Kecamatan Panti tergolong sedang dan tinggi berpotensi terjadinya banjir bandang [<http://www.esdm.go.id/berita/geologi/42-geologi/5079-73-titik-dikecamatan-panti-jember-rawan-gerakan-tanah-masyarakat-diminta-waspada.html>] [14 oktober 2012]].

Dari pernyataan tersebut, wilayah Kecamatan Panti terdapat 73 Titik retakan tanah yang harus diwaspadai. Di Desa

Pakis sendiri saat ini terdapat titik retakan tanah yang berada di Dusun Ketajek atau daerah Afdeling Kahendran, terdapat 18 titik retakan tanah. Hal ini diungkapkan oleh Pak Satuman, selaku Ketua RT di Dusun Ketajek:

“Ya, di setiap sudut ada, kira-kira ada 18 titik rawan longsor”.

Menurut pengamatan peneliti kondisi ini sangat parah, sebab di setiap sisi Lereng Pegunungan Argopuro di Desa Pakis terdapat titik-titik retakan tanah baik besar maupun kecil dan yang tertutup oleh tanaman kopi, sehingga ketika hujan lebat secara terus menerus dalam beberapa hari kemungkinan besar akan memicu terjadinya tanah longsor yang disertai banjir bandang. Hal tersebut sangat membahayakan bagi masyarakat di Dusun Cempaka yaitu dusun yang diprediksi termasuk wilayah terdampak banjir bandang.

Dalam analisis hasil gejala alam tentang peringatan dini yaitu dalam kegiatan FGD yang telah dilakukan oleh JICA dan hasil akhir berupa pengkonstruksian masyarakat setelah kegiatan tersebut mengenai peringatan dini banjir bandang. Dalam kegiatan FGD yang dilakukan oleh JICA, ada permasalahan-permasalahan masyarakat di Desa Pakis dalam mengikuti kegiatan FGD tersebut. Permasalahan pada kegiatan FGD yaitu tentang pengisian kuesioner, dimana di dalam kegiatan tersebut hanya sebagian kecil yang mengembalikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih kurang. Sebab masyarakat di Desa Pakis sebagian masih buta huruf dan sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pakis yang tergolong masih rendah.

Selain itu dalam penyampaian yang disampaikan oleh JICA Bahasa yang digunakan sedikit dipahami oleh masyarakat sebab bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris, walaupun diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia hanya sebagian masyarakat yang mengerti akan maksud yang disampaikan dalam pemberian materi yang dilakukan oleh JICA. Sebagian masyarakat lainnya hanya mengerti bahasa Madura.

Dalam analisis hasil gejala bencana yaitu setelah JICA pergi yaitu masyarakat mulai memahami resiko bencana yang akan terjadi. Untuk meminimalisir resiko yang terjadi yaitu dengan tidak melakukan penebangan liar sebab jika terjadi penebangan liar seperti yang kemaren-kemaren maka akan berdampak pada masyarakat bawah, yaitu masyarakat di Dusun Cempaka. Alternatif lainnya yaitu mengambil yang telah patah di sungai, hal ini lebih baik, karena jika kayu patah dan menumpuk akan berbahaya juga bagi masyarakat di bawah, yaitu masyarakat di Dusun Cempaka. Kesadaran manusia yang sering lalai akan hal tersebut, sebab masyarakat awam yang terlalu banyak lupa akan resiko keselamatan mereka, membuat masyarakat haruslah di bimbing untuk memahami akan kondisi tersebut.

Dalam pengambilan tindakan oleh pihak berwenang yang dilakukan ialah untuk meminimalisir terjadinya korban, pak Zaini selaku Kepala Desa Pakis

meminta kepada pak Fitriyah dalam menaikkan status sensor ketinggian air, yaitu jika kondisi air sungai naik pada level 1 yaitu pada “status perhatian” diganti langsung menjadi level 3 yaitu “status mengungsi”, agar masyarakat bisa bersiap-siap untuk mengungsi lebih cepat dari kondisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena masyarakat ketika dalam kondisi yang panik, tidak bisa mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa, jika alarm sudah berbunyi, hal tersebut mengisyaratkan masyarakat untuk siap-siap mengungsi ke tempat yang lebih aman, walaupun dengan catatan kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya, menjadi berbahaya karena masyarakatlah yang diutamakan untuk diselamatkan.

Ketika dalam kondisi banjir dan untuk memberitahukan masyarakat akan kondisi sebenarnya, pak Fitriyah sebagai penanggungjawab dan pengelola alat sensor ketinggian air harus mengerti terlebih dahulu akan kondisi tersebut untuk memberitahukan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara menghidupkannya di langgar, dan masyarakat harus bersiap-siap untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun, pak Fitriyah harus menunggu instruksi dari pak Sutrisno, sebab pak Sutrisno adalah penanggungjawab yang sebenarnya, dan sensor ketinggian ini tergantung pada sensor curah hujan, dimana ketika intensitas curah hujan tinggi maka debit air sungai juga akan tinggi.

Sensor ketinggian air terletak di DAM Cempaka. Sebenarnya sensor ketinggian air ini berada di atas, terhubung di atas sarana penerangan masih kurang memadai karena masih menggunakan kincir. Jika terjadi banjir lagi, yang ditakutkan yaitu alat tersebut akan hilang terseret arus. Sensor ketinggian air tersebut, diletakkan di bawah yaitu di DAM Dusun Cempaka.

Dengan keadaan yang demikian hal tersebut sebenarnya tidak kondusif. Sebab, sensor ketinggian air jika berbunyi dekat dengan masyarakat yang berada di wilayah Dusun Cempaka, namun jika terjadi banjir bandang mendadak tidak memungkinkan masyarakat di Dusun Cempaka untuk menyelamatkan diri sebab letak sensor ketinggian air yang terlalu dekat ditambah lagi jika jembatan tersumbat oleh benda-benda material berupa batu, kayu dan sebagainya akan membuat masyarakat menyelamatkan diri dengan secepatnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Sutrisno, selaku Wakil Kepala Dusun Cempaka:

“...ya mungkin sama ndak anu, apa kalau tau alarmnya kan paling bunyi satu, dua, tiga paling ndak dekat sama masyarakat. Tapi kalau banjir mendadak besar itu ndak nutut orang mau lari, kan ndak masuk akal sudah kalo sudah jembatan nyumbet umpamanya ya banjir itu cepat larinya ya itu cepat”

Selain itu, pos pantau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan di luar dari kegiatan yang dilakukan oleh JICA. Pos pantau ini dibangun tanpa adanya surat pemberitahuan untuk membangun pos pantau. Mereka hanya meminta lahan kosong untuk pos pantau itu dibangun. Setelah mendapat instruksi dari pak Zaini kepada pak Sutrisno, pak Sutrisno memilih lahan kosong sebelah sawah yang letaknya lebih tinggi dari rumah warga di Dusun Cempaka, yang letaknya berdekatan dengan sensor ketinggian air. Setelah

pembangunan pos pantau ini selesai, tidak ada tindak lanjut dari pos pantau ini.

Perencanaan pembangunan Pos pantau ini ada tiga tempat yaitu di Cempaka (sudah terealisasi), daerah portal. Daerah portal yaitu daerah perbatasan antara dusun Cempaka dan daerah Perkebunan dan terdapat portal sebelum masuk daerah ini. dan di persil, persil adalah sebutan lain daerah Afdeling Kahendran atau Dusun Ketajek, masyarakat juga ada yang menyebutnya daerah besaran.

Walaupun di dalam keanggotaan bentukan dari JICA para pengemban tugas lupa akan anggotanya siapa namun yang masih digunakan oleh masyarakat di Desa Pakis salah satunya yaitu aparat pemerintah desa tetap menggunakan anggota-anggota bentukan dari JICA, dengan cara melakukan rapat ketika bulan-bulan sudah mendekati bulan hujan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi akibat angin dan hujan yang disertai banjir.

Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini pada tahap eksternalisasi yaitu setelah kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh JICA. Dalam penyebarluasan informasi ada beberapa kendala yaitu pemberian alat komunikasi *handy talky* atau yang lebih dikenal dengan HT atau *orari*. Permasalahan penyebarluasan kurang berjalan dengan baik, dikarenakan HT yang diberikan oleh JICA jika terjadi bencana tidak ada sinyal dan jaraknya hanya 500 meter saja terdapat frekuensi sinyal.

Dalam penyebarluasan informasi ke beberapa pihak, hanya menunggu instruksi dari kordinator wilayah hilir (sutrisno). kegiatan yang dilakukan oleh JICA tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini terbukti ketika pelatihan selesai, selesailah juga tugas dan wewenang orang-orang yang bekerjasama dengan JICA. Ketika kerusakan terjadi maka tidak ada tanggungjawab dari dalam hati para pelaku relawan yang memberikan pelatihan bersama dengan JICA. Hal yang dilakukan hanya janji-janji belaka yang ketika terjadi kerusakan alat-alat monitoring yang diberikan oleh JICA mereka angkat tangan, sedangkan untuk memperbaiki sendiri, para perangkat merasa kesulitan, sebab yang digunakan ialah bahasa inggris dalam petunjuk memperbaiki alat monitoring peringatan dini yang kurang dipahami oleh masyarakat di Desa Pakis.

Walaupun Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh JICA terdapat banyak kendala dan banyak pula hal yang diambil oleh masyarakat sebenarnya kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh JICA masih dirasa kurang oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang mereka dapatkan selama pelatihan berlangsung masih dirasa kurang. Sebab, pelatihan yang dilakukan oleh JICA berlangsung hanya dua hari.

Dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat, alat monitoring berupa sensor curah hujan yang dipegang pak Sutrisno tidak setiap hari dipasang. Hal ini dikarenakan beliau lebih percaya pada pengamatan secara langsung daripada melihat alat monitoring sensor

curah hujan ini. Alat monitoring ini jika dalam kondisi normal tidak dipasang, namun jika kondisi hujan, barulah alat ini dipasang.

Hal serupa juga dilakukan oleh Pak Fitriyah, Kesadaran pak Fitriyah akan bahaya bencana banjir masih kurang, sebab alat sensor ketinggian air juga dipasang pada waktu kondisi hujan, namun pada kondisi normal tidak dipasang. Hal ini disebabkan karena jarak antara alat sensor ketinggian air tersebut berdekatan dengan pos pantau yang memiliki jarak kurang lebih 75 meter dari rumahnya membuat pak Fitriyah berpikir dua kali untuk memasang stop kontak penghubung ke alat sensor ketinggian air pada kondisi normal.

Hal ini disebabkan penyaluran listrik ke rumah beliau pada awalnya tanpa mendapatkan persetujuan. Sebab, saluran aliran listrik alat sensor ketinggian air dipasang seandainya tanpa persetujuan dari pak Fitriyah. Keberatan demi keberatan beliau utarakan, sebab saluran listrik tersambung ke alat ketinggian air menuju rumahnya. Keberatan beliau terjadi dikarenakan aliran daya tampung alat sensor ketinggian air ini mencapai 900 watt. Alat ini tidak disambungkan ke tiang listrik tapi disambungkan ke listrik masyarakat sendiri. Hal inilah yang menjadi pemicu kekesalan beliau yang tidak ada musyawarah sebelumnya tentang penyaluran listrik tersebut.

Keberfungsian sensor curah hujan dan sensor ketinggian air ini, terpakai ketika banjir yang terjadi pada tahun 2012 lalu, intensitas air hujan berada pada level 3 yaitu “kondisi Evakuasi”. Dengan kondisi tersebut, pak Sutrisno yaitu seorang Wakil Kepala Dusun Cempaka dan Koordinator Wilayah Hilir sekaligus bertanggung jawab terhadap alat sensor ketinggian dan sensor curah hujan, menghimbau warga yang berada di Dusun Cempaka bawah untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal tersebut diungkapkan oleh pak Sutrisno, selaku Wakil Kepala dusun Cempaka:

“ya digunakan ya awal hujan kemaren, ya berfungsi. Ya barusan ini waktu hujan ini jadi airnya sampai level tiga. Saya langsung kesana, orang-orang suruh hati-hati yang dibawah sana ke tempat titik aman sudah”.

Dalam pengambilan tindakan oleh masyarakat dalam tahap eksternalisasi yaitu masyarakat masih memegang status yang diemban ketika pelatihan JICA dibentuk seperti memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi sebab, masyarakat adalah resiko pertama dalam bencana dan harus yang paling utama diselamatkan. Walaupun dalam realitas yang terjadi para *stakeholders* yang sudah dibentuk oleh JICA tidak dibayar namun mereka tidak merasa keberatan untuk melakukan hal tersebut sebab keselamatan masyarakat adalah yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya.

Selain itu kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh JICA masih dirasa kurang oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang mereka dapatkan selama pelatihan berlangsung masih dirasa kurang. Sebab, pelatihan yang dilakukan oleh JICA berlangsung hanya dua hari.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses dialektis konstruksi sosial sistem peringatan dini meliputi tiga simultan, yaitu:

a. Tahap objektivasi sistem peringatan dini

Institusi pelembeagaan sudah mulai masuk. Hal ini ditandai dengan datangnya *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang bekerjasama dengan NGO di Kabupaten Jember yaitu Yayasan Pengabdian Masyarakat (YPM) yang memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini banjir bandang. Kegiatan ini meliputi 1) *site watching*; 2) *Focus Group Discussion* (FGD) yang dibagi dalam dua sesi dengan menggunakan metode kuesioner, metode (*Logical Framework Analysis*) FLA; 3) penentuan *stakeholders* peringatan dini banjir dan pengenalan alat monitoring peringatan dini banjir bandang di Desa Pakis; 4) SOP peringatan dini ini dibuat dari rangkaian kegiatan yaitu mulai dari FGD, Site Watching, TTE dan dihasilkanlah SOP ini; dan 5) pembentukan individu-individu masyarakat dalam *stakeholders* yang dibentuk oleh JICA.

b. Tahap internalisasi sistem peringatan dini

Proses internalisasi di Desa Pakis yaitu lebih cenderung pada sosialisasi sekunder. Masyarakat mulai masuk dan mempelajari hal yang baru diluar pengetahuan mereka yang lama, seperti contohnya pengetahuan mereka tentang bencana dan langkah-langkah yang dilakukan mengenai bencana itu apa. Anggota di dalam masyarakat di Desa Pakis masuk ke dalam dunia objektif manusia, yaitu masyarakat yang telah masuk ke dalam dunia buatan JICA berupa pelatihan tentang peringatan dini banjir bandang.

c. Tahap eksternalisasi sistem peringatan dini

Di dalam tahap Eksternalisasi ini dalam pelaksanaannya setiap individu melakukan penafsiran berbeda dengan individu lainnya. Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memahami kegiatan yang telah dilakukan oleh JICA. Dengan keadaan yang demikian, realitas yang terjadi yaitu pemikiran masyarakat akan kegiatan yang telah dilakukan oleh JICA merupakan keputusan pribadi bagi individu yang menjalalannya. Sehingga dalam realitas yang dihadapinya, anggota masyarakat menafsirkan sesuai dengan apa yang menjadi keputusannya pada waktu pelatihan dan setelah kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh JICA selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Affeltranger, Bastian (*et.al.*). 2007. *Hidup Akrah dengan Bencana. Terjemahan*. Cetakan I. Jakarta: MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia).
- Berger, Peter & Luckmann, Thomas. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi*

Rindang El Nabila, Konstruksi Sosial Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Desa Pakis Kecamatan Panti.....

Pengetahuan. Alih bahasa oleh Hasan Basari. 2013. Cetakan kesepuluh. Jakarta: LP3ES.

tanah-masyarakat-diminta-waspada.html [14 oktober 2012].

Harjadi, Prih. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta Pusat: Direktorat Mitigasi, Lakhtar Bakornas PB.

Winerungan, Hartje R dkk. 2012. *Menuju Desa /Kelurahan Tangguh Bencana*. Gema BNPB volume 111. [Serial Majalah Online], diakses di <http://bnpb.go.id/website/asp/pub.asp?p=2> [5 November 2012].

Marfai, Aris (et al.,). 2012. *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana Kajian Integratif ilmu, Agama, dan Budaya*: PT Mizan Pustaka.

Poloma, Margaret. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Maarif, Syamsul. 2008. *Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). [Tidak Dipublikasikan].

Internet

Soliha Hani, Evita. 2011a. *Manual Evakuasi Darurat Bencana Banjir Bandang*. [Serial Penelitian Online]. Jember: Kerjasama Yayasan Pengabdian Masyarakat (YPM) dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Diakses di <http://www.ProjectJICA.com> [3 Mei 2012].

Soliha Hani, Evita. 2011b. *Laporan Akhir Focus Group Discussion dan Site Watching Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Kabupaten Jember*. [Serial Penelitian Online]. Jember: Kerjasama Yayasan Pengabdian Masyarakat (YPM) dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Diakses di <http://www.ProjectJICA.com> [3 Mei 2012].

Soliha Hani, Evita. 2011c. *Table Top Exercises Early Warning System In Banjir Bandang Disaster*. [Serial Penelitian Online]. Jember: Kerjasama Yayasan Pengabdian Masyarakat (YPM) dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Diakses di <http://www.ProjectJICA.com> [3 Mei 2012].

Soliha Hani, Evita. 2011d. *Standard Operating System (SOP) Sistem Peringatan Dini Sebelum Kejadian Banjir Bandang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Pakis di Kabupaten Jember*. [Serial Penelitian Online]. Jember: Kerjasama Yayasan Pengabdian Masyarakat (YPM) dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Diakses di <http://www.ProjectJICA.com> [3 Mei 2012].

Surono. 2010. *73 Titik di Kecamatan Panti, Jember Rawan Gerakan Tanah*. Kementerian Energi & Sumberdaya Mineral. Tersedia pada: <http://www.esdm.go.id/berita/geologi/42-geologi/5079-73-titik-dikecamatan-panti-jember-rawan-gerakan->